

SKRIPSI

PENGAWASAN TERHADAP PEKERJA *OUTSOURCING* DI KOTA PADANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

MAULANA ABROR IBRAHIM
2110112151

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Khairani, S.H., M.H
Darnis, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg:25/PK-VII/IV/2025

No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa	No. Alumni Fakultas
Maulana Abror Ibrahim		
a. Tempat/Tgl Lahir : Padang / 3 Februari 2003	f. Tanggal Lulus : 13 Agustus 2025	
b. Nama Orang Tua : Davy Hendri dan Nurmina	g. Predikat Lulus : Dengan Pujian	
c. Fakultas : Hukum	h. Lama Studi : 4 Tahun	
d. PK : Hukum Administrasi Negara	i. IPK : 3,88	
e. No. BP : 2110112151	j. Alamat : Perumahan Vila Fakhriindo, Gang Mawar No. 13	

PENGAWASAN TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DI KOTA PADANG

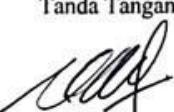
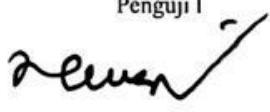
*(Maulana Abror Ibrahim, 2110112151, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 94 halaman, 2025)*

ABSTRAK

Outsourcing menurut UU Ketenagakerjaan merupakan praktik penyerahan sebagian pekerjaan suatu perusahaan kepada perusahaan lain. *Outsourcing* mulai diminati oleh berbagai perusahaan guna meningkatkan produktifitas, selain itu perusahaan pengguna tidak perlu memikirkan pemenuhan hak bagi pekerja karena telah ditanggung oleh perusahaan penyedia jasa pekerja. Meskipun dari segi bisnis penggunaan sistem *outsourcing* dinilai cukup praktis dan efisien, namun pada kenyataanya banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja *outsourcing*. Berdasarkan fakta tersebut, maka diperlukan pengawasan terhadap pekerja *outsourcing* guna menjamin terpenuhinya hak mereka. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pekerja *outsourcing* di Kota Padang? 2. Bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pekerja *outsourcing* di Kota Padang? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan teknis pengumpulan data melalui metode wawancara dan studi dokumen. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah: 1. Pelaksanaan pengawasan terhadap pekerja *outsourcing* di Kota Padang dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan secara preventif dan pengawasan secara represif. Pengawasan secara preventif dilakukan melalui monitoring langsung secara berkala ke perusahaan untuk memantau kepatuhan perusahaan sekaligus memberikan edukasi terkait norma ketenagakerjaan, sedangkan pengawasan secara represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya temuan atau aduan terkait pelanggaran norma ketenagakerjaan oleh perusahaan. 2. Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan terhadap pekerja *outsourcing* di Kota Padang dilakukan melalui dikeluarkannya nota pemeriksaan oleh pengawas. Nota pemeriksaan terdiri dari nota pemeriksaan I dan nota pemeriksaan II dan akan diberikan secara bertingkat. Jika perusahaan tidak melaksanakan perintah setelah dikeluarkannya kedua nota tersebut, maka UPTD akan melakukan tindak penyidikan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS bertugas mengumpulkan seluruh berkas yang diperlukan untuk dimasukkan ke pengadilan. Melalui proses pengadilan maka akan ditetapkan sanksi pidana yang dikenakan kepada perusahaan.

Kata Kunci: *Outsourcing, Ketenagakerjaan, Pengawasan, Perusahaan.*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 13 Agustus 2025.
Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Tata Negara: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

No. Alumni University	Student Name	No. Faculty Alumni
Maulana Abror Ibrahim		
a. Place/Date of Birth : Padang / Februari 3 rd 2003	f. Graduation Date : 13 th August 2025	
b. Parents Name : Davy Hendri and Nurmina	g. Predicate : Cumlaude	
c. Faculty : Law	h. Study Time : 4 Years	
d. Concentration : Administrative Law	i. GPA : 3,88	
e. No. BP : 2110112151	j. Address : Vila Fakhirsindo, Gang Mawar No. 13	

SUPERVISION OF OUTSOURCED WORKERS IN PADANG CITY

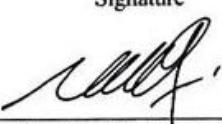
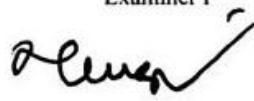
(Maulana Abror Ibrahim, 2110112151, Administrative Law, Faculty of Law, Andalas University, 94 Pages, Year 2025)

ABSTRACT

Outsourcing, according to the Labor Law, is the practice of transferring part of a company's work to another company. Outsourcing has become popular among various companies as a means of increasing productivity. In addition, the user company does not need to worry about fulfilling the rights of workers because these are covered by the service provider company. Although from a business perspective, the use of outsourcing is considered practical and efficient, in reality, there are many violations of the rights of outsourced workers. Based on these facts, supervision of outsourced workers is necessary to ensure the fulfillment of their rights. The research questions in this study are: 1. How is the supervision of outsourced workers implemented in Padang City? 2. What are the follow-up actions taken based on the results of supervision of outsourced workers in Padang City? The research method used is legal-empirical, with data collection techniques involving interviews and document analysis. The collected data is then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of this study are as follows: 1. Supervision of outsourced workers in Padang City is carried out in two ways, namely preventive supervision and repressive supervision. Preventive supervision is carried out through regular direct monitoring of companies to monitor compliance and provide education on labor standards, while repressive supervision is carried out after findings or complaints regarding violations of labor standards by companies. 2. Follow-up actions on the results of supervision of outsourced workers in Padang City are carried out through the issuance of inspection notes by supervisors. Inspection notes consist of Inspection Note I and Inspection Note II and are issued in stages. If the company fails to comply with the orders after the issuance of both notes, the UPTD will conduct an investigation through Civil Servant Investigators (PPNS). PPNS are responsible for collecting all necessary documents to be submitted to court. Through the court process, criminal penalties will be imposed on the company.

Keywords: Outsourcing, Labor, Supervision, Company.

This Minor Thesis has defended in front of the examiner team at August 13th, 2025
Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		

Acquainted,
Head of Department of State Administrative Law: Hendria Fithrina, S.H., M.H.


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: